

FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL (Studi Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah)

Rheza Rahadhitya, Darsono¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of auditor experience, risk management, education, training, effective internal control system, dan management support on internal audit effectiveness in Inspectorate of Central Java.

The population of this study are the auditors of Inspectorate of Central Java which totaling 33 peoples. Because the small number of the population, therefore in this study is using census method, which uses the population as a sample. The data for this study were obtained through a questionnaire administrated to the auditors in Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. The data were analyzed using SPSS version 20, hence the hypotesis are tested by the multiple regression analysis.

The result showed that auditor experience, education, training and effective internal control system has significant positive effect on internal audit effectiveness. Whereas risk management and management support has no significant effect on internal audit effectiveness.

Keywords: internal audit effectiveness, internal audit, corruption, contingency theory.

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota dengan maksud mewujudkan:

1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik;
2. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan;
3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Guna mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik yang mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya *good governance* di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang bahkan telah mengakar di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara bersamaan.

Berdasarkan data penanganan tindak pidana korupsi semester I dan II tahun 2014

¹ Corresponding author

yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikategorikan menjadi 3 yaitu berdasarkan sektor, instansi dan profesi. Berdasarkan sektor diketahui bahwa pada semester I dan II penanganan korupsi pada sektor keuangan daerah berada di nomor 2 yaitu sejumlah 60 dan 74, terbanyak setelah sektor infrastruktur. Kemudian untuk berdasarkan instansi, diketahui bahwa pemerintah daerah berada pada urutan pertama baik di semester I dan II dengan jumlah kasus sebanyak 97 dan 108. Dan untuk kategori terakhir, berdasarkan profesi diketahui bahwa pada urutan pertama ditempati oleh pejabat atau pegawai pemda/kementrian baik pada semester I dan II dengan jumlah 281 dan 160. Data lain yang bersumber dari harian Kompas menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia dari berbagai elemen dan tingkat penindakannya selama 11 tahun terakhir. Bersumber dari data tersebut, pegawai negeri sipil (PNS) menduduki peringkat kelima dari 12 elemen yang ada di Indonesia dengan skala 4 dari 5, sedangkan untuk tingkat Asia Tenggara menduduki peringkat ketiga dengan skala 3,5 dari 5.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa tingkat korupsi di sektor publik baik di pusat maupun daerah masih tergolong tinggi. Dengan tingginya tingkat korupsi tersebut, diindikasikan bahwa peran lembaga pengawasan belum berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Sehingga untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dirasa sulit, dikarenakan masih terdapat “celah-celah” yang dapat dijadikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan utamanya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan terwujud jika sistem pengawasannya dapat berfungsi dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan demikian sistem pengawasan mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2005, h.189), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pengawasan merupakan fungsi terakhir dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai tingkat provinsi/kabupaten/kota, hingga tingkat departemen. Inspektorat provinsi/kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dan pengawasan khusus pada SKPD yang ada setiap provinsi/kabupaten/kota.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah dibawah gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam sebuah perusahaan. Menurut Bastian (2014) audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah.

Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu dengan adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi (Badara dan Saidin, 2014). Jika fungsi audit internal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik *good governance* di dalam suatu organisasi.

Peran dan fungsi Inspektorat provinsi/kabupaten/kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perencanaan program pengawasan;
2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Proses reformasi di dalam praktiknya ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan- permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan dan proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat yang bersumber dari Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2015, yaitu:

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif.

Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik. Hal ini mengakibatkan munculnya kendala terhadap laporan hasil pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP menjadi kurang optimal.

2. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.

Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang pengawasan.

3. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan lemah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah terkait bidang pengawasan, yaitu jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan opini WTP, sangat bergantung kepada APIP di kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

5. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah.

Saat ini di jajaran Inspektorat daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk dibawah BPKP, sementara P2UPD berada dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

6. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya ditindaklanjuti. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

7. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menciptakan *good governance* di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dapat terwujud jikalau berbagai pihak yang terkait baik eksternal dan

internal ikut serta dalam mendorong terwujudnya hal tersebut.

Salah satu bentuk kongkrit dari perwujudan *good governance* adalah sistem pemeriksaan yang baik, efektif, dan efisien. Tentunya hal tersebut yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam rencana strategis (Renstra) menjadi dasar penentuan permasalahan dalam penelitian ini.

Permasalahan pertama adalah belum adanya penentuan target dan kinerja secara komprehensif, penentuan target hanya didasarkan pada jumlah obyek pemeriksaan (obrik) saja. Bahkan penentuan skala prioritas terhadap obyek pemeriksaan tersebut belum dilaksanakan, sehingga tidak diketahui nilai strategis, beban kerja, dan risiko atas obyek pemeriksaan tersebut.

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah keterbatasan sumber daya manusia di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Mengingat jumlah auditor hanya sebanyak 33 orang, jumlah tersebut masih jauh dari jumlah ideal auditor yang tertulis dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 48 orang. Minimnya jumlah auditor di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menjadikan proses pengawasan dan pembinaan yang kurang optimal, selain itu terdapat jabatan fungsional auditor (JFA) yang tingkat kompetensinya belum memadai. Lalu kurang efektifnya penyelenggaraan pelatihan-pelatihan yang diperuntukan untuk auditor dan penempatan pejabat struktural belum mempertimbangkan latar belakang di bidang pengawasan.

Sampai saat ini struktur eselon di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih sejajar dengan SKPD, hal tersebut berdampak kepada kurangnya tingkat responsivitas SKPD sebagai *auditee* terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *contingency theory*. *Contingency theory* merupakan sebuah teori dasar yang sering kali digunakan dalam penelitian mengenai akuntansi manajemen dan audit. Meskipun dalam penerapannya teori ini memiliki efek yang berbeda tergantung pada pengaplikasiannya dan lingkungan. *Contingency theory* menurut Daft (2009, h.26), *contingency means that one thing depends on other things, and for organizations to be effective, there must be a "goodness of fit" between their structure and the conditions in their external environment.*

Badara dan Saidin (2014) berpendapat bahwa *contingency theory* mampu membantu peneliti untuk menjelaskan secara sistematis mengenai sebuah fenomena. Dan teori ini mampu menjelaskan hubungan antara 2 variabel atau lebih.

Efektivitas audit internal merupakan sesuatu yang harus dicapai dan diwujudkan. Hal tersebut tentunya tidak akan dapat tercapai jikalau tidak ada faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai dan mewujudkan hal tersebut.

Dalam penelitian ini efektivitas audit internal bergantung pada *contingency variables* (variabel-variabel penghubung) yaitu pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support*.

Penelitian ini berusaha untuk menguji pengaruh pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal dan *management support* terhadap efektivitas audit internal.

Pengalaman auditor mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin lama auditor bekerja dalam hal waktu dan jumlah penugasan maka akan lebih mudah

untuk mencapai tujuan audit internal itu sendiri, dalam hal ini akan meningkatkan efektivitas audit internal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2013) mengemukakan bahwa pengamalan auditor merupakan sebuah isu penting di mana hal tersebut menjadi tolak ukur seorang auditor untuk dapat dikatakan baik, handal, dan profesional. Selain itu pengalaman tersebut dapat menjadi sebuah ajang berlatih bagi para auditor untuk mendapatkan ke profesionalismenya dan hal tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi auditnya (Intakkan dan Ussahawanitchakit dalam Badara dan Saidin, 2013).

Hal tersebut ditegaskan kembali oleh penelitian yang dilakukan oleh (Arel *et al.*, dalam Badara dan Saidin, 2013) yang menjelaskan bahwa seiring dengan pengetahuan auditor yang terus bertambah maka menyebabkan struktur pengetahuan mereka menjadi semakin berkembang dengan baik.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pengalaman yang dimiliki oleh auditor maka membuat mereka lebih dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya. Tentunya hal tersebut akan mempermudah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan tujuan organisasi, jikalau para auditornya memiliki pengalaman yang cukup di bidang *auditing*.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H1: Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Manajemen risiko berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dikarenakan dengan dikelolanya risiko maka risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dapat direduksi, sehingga pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2013) yang mengemukakan bahwa usaha suatu negara dalam mengembangkan manajemen risiko dan menjaga berlangsungnya *good governance* pada sektor publik merupakan sebuah langkah penting dan hal tersebut harus dijaga keberlangsungannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beasley, Clune, dan Hermanson (2006) yang menyatakan bahwa manajemen risiko berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Manajemen risiko merupakan unsur penting dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang terdiri dari proses identifikasi dan penilaian risiko. Seperti halnya yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa penetapan tujuan berkaitan dengan kegiatan penilaian risiko. Dengan kata lain, penerapan manajemen risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H2: Manajemen risiko berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Pendidikan mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin tinggi pendidikan seorang auditor maka kualifikasi, wawasan, dan pola berpikir seorang auditor akan jauh lebih baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan auditor untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya guna mewujudkan tujuan organisasi. Pendidikan merupakan sebuah indikator penting bagi setiap negara untuk melihat sejauh mana negara tersebut berkembang, selain itu pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas maka negara tersebut dapat dikatakan maju.

Menurut Suwardjono (1992, h.167) menyatakan bahwa, pengembangan pendidikan akademis yang dimiliki oleh auditor sangat diperlukan, sehingga para auditor yang secara teoritis telah mempelajari pengauditan tidak tergelincir menjadi

pragmatis akan tetapi akan menjadi lebih profesional karena mendapatkan masukan yang lebih besar mengenai profesionalisme dari pendidikan profesional yang merupakan pengembangan pendidikan akademik.

Terlebih Inspektorat sebagai lembaga fungsional pengawasan di tingkat provinsi yang memiliki kredibilitas baik, terutama dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2011-2014) yang mampu membantu Provinsi Jawa Tengah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan².

Oleh sebab itu para auditor dituntut untuk memiliki pendidikan paling rendah S1, bahkan banyak auditor yang sudah memiliki gelar S2 dan beberapa sudah mengambil pendidikan profesi akuntan (PPA). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas individu auditor, terlebih jika auditor tersebut sudah memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan kualifikasi yang baik maka pencapaian dan perwujudan tujuan akan mudah terealisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,
H3: Pendidikan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Pelatihan mempengaruhi efektivitas audit internal dikarenakan semakin banyaknya pelatihan yang diikuti oleh auditor, maka secara langsung keterampilan auditor akan meningkat juga. Sehingga proses pencapaian tujuan akan jauh lebih mudah. Pelatihan adalah pengetahuan atau wawasan yang diperoleh dari luar lingkungan pendidikan non formal. Pelatihan ditujukan pada peningkatan kemampuan, sehingga pelatihan haruslah dilaksanakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang membanggakan.

Selain itu pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan diri dalam menghadapi pekerjaan. Pelatihan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tambahan yang menunjang dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Jadi, dapat dikatakan pelatihan merupakan suatu investasi di masa datang bagi auditor dan organisasi.

Pelatihan di kalangan auditor sudah tidak asing lagi, dikarenakan hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sebagai auditor. Pelatihan merupakan alternatif yang banyak dipilih, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan akademis dengan tujuan mengembangkan keterampilan yang sama.

Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah secara rutin menyertakan auditornya untuk mengikuti pelatihan di tingkat daerah maupun pusat.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,
H4: Pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dikarenakan tujuan organisasi tidak akan tercapai dengan baik dan mudah jika tidak ada fungsi pengendalian yang baik pula. Pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan efektivitas audit internal, hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa: pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dengan ditetapkannya aturan mengenai pengendalian internal melalui peraturan pemerintah tersebut, implementasinya pun harus dilaksanakan dengan efektif, efisien

² Jateng Pos, Jumat, 5 Juni 2015

dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar apa yang menjadi tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dapat terwujud.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jokippi (2009) yang mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal merupakan suatu capaian di mana tujuan organisasi terwujud dengan cara-cara yang efektif dan efisien dengan memperhatikan aturan dan hukum yang berlaku.

Kemudian penelitian oleh Badara dan Saidin (2014) mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal mengacu pada sampai sejauh mana kontrol yang dilakukan pimpinan guna mewujudkan tujuan organisasi.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H5: Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Management support berpengaruh terhadap efektifitas audit internal dikarenakan dukungan atau *feedback* yang bersifat positif dan tingkat responsivitas dari SKPD terhadap temuan dan rekomendasi yang diberikan akan mempengaruhi pencapaian dan perwujudan tujuan organisasi itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007) yang menyatakan bahwa *management support* merupakan salah satu faktor penting guna mewujudkan efektivitas audit internal.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut,

H6: *Management support* berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 33 orang. Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner kepada 33 auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Persepsi responden terhadap indikator tersebut diukur dengan skala Likert, di mana skala tersebut mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata sebagai berikut (Sugiyono, 2014): (1) sangat setuju; (2) setuju; (3) ragu-ragu; (4) tidak setuju; (5) sangat tidak setuju.

Kemudian hasil jawaban responden tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan nilai dari jawaban tersebut. Dimana jawaban sangat positif akan diberi nilai 5, jawaban ragu-ragu akan diberi nilai 3, dan jawaban sangat negatif akan diberi nilai 1. Kemudian untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi SPSS 20.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Gambaran Umum Responden

Keterangan	Kriteria	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Pria	24	73%
	Wanita	9	27%
Usia	35-39	6	18%
	0	2	6%
	45-49	3	9%
	50-54	11	33%
	55-59	11	33%
Jenjang Pendidikan	S1	22	67%
	S2	11	33%
	III/b	1	3%
	III/c	7	21%
Golongan	III/d	11	33%
	IV/a	13	39%
	IV/b	1	3%
Pengalaman Kerja	1-4	4	12%
	5-9	13	39%
	10-14	16	48%

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data pada tabel 1 menjelaskan mengenai gambaran umum responden yang dikelompokkan menurut: jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, golongan, dan pengalaman kerja. Sejumlah 24 responden (73%) adalah pria dan 9 responden (27%) adalah wanita.

Usia responden terbagi menjadi 5 golongan. Golongan usia 35-39 sejumlah 6 responden (18%), golongan usia 40-44 sejumlah 2 responden (6%), golongan usia 45-49 sejumlah 3 responden (9%), golongan usia 50-54 sejumlah 11 responden (33%), dan golongan usia 55-59 sejumlah 11 responden (33%).

Tingkat pendidikan terendah responden adalah S1 dengan jumlah 22 responden (67%) dan 11 responden (33%) adalah S2.

Pangkat terendah responden adalah III/b, dengan jumlah sebesar 1 responden (3%), III/c sejumlah 7 responden (21%), III/d sejumlah 11 responden (33%), IV/a sejumlah 13 responden (39%), dan IV/b sejumlah 1 responden (3%).

Pengalaman kerja responden terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama dengan masa kerja 1-4 tahun sejumlah 4 responden (12%), golongan kedua dengan masa kerja 5-9 tahun sejumlah 13 responden (39%), dan golongan ketiga dengan masa kerja 10-14 tahun sejumlah 16 responden (48%).

Tabel 2
Hasil Regresi

Model	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
1 (Constant)		-0.815	0.422
Pengalaman Auditor	0.254	2.444	0.022
Manajemen Risiko	0.018	0.254	0.802
Pendidikan	0.308	3.585	0.001
Pelatihan	0.293	2.371	0.025
Efektivitas Pengendalian Internal	0.260	2.566	0.016
<i>Management Support</i>	0.039	0.482	0.634

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data pada tabel 2 menjelaskan mengenai hasil regresi sebagai berikut: pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal (β : 0.254; t: 2.444; sig: 0.022) sehingga H1 diterima dan hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2014) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Manajemen risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal (β : 0.018; t: 0.254; sig: 0.802) sehingga H2 ditolak dan hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2014) dikarenakan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan optimal. Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal (β : 0.308; t: 3.585; sig: 0.001) sehingga H3 diterima. Pelatihan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal (β : 0.293; t: 2.371; sig: 0.025) sehingga H4 diterima. efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal (β : 0.260; t: 2.566; sig: 0.016) sehingga H5 diterima dan hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Badara dan Saidin (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. *Management support* tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal (β : 0.039; t: 0.482; sig: 0.634) sehingga H6 ditolak dan hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mihret dan Yismaw (2007) yang menyatakan bahwa *management support* berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal. Praktik *management support* di organisasi-organisasi sektor publik di Ethiopia sudah berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan dan komitmen dari berbagai pihak yang terkait untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sedangkan yang menjadi kendala di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya responsivitas dari SKPD selaku *auditee* terhadap temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan struktur eselon di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih setingkat dengan SKPD, tentunya hal tersebut akan menjadikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan bias. Jika kedepannya mandat penguatan Inspektorat agar setingkat sekretaris daerah dapat terwujud tentunya praktik *management support* akan jauh lebih baik dan optimal.

Tabel 3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.947	0.896	0.872	1.19018

Sumber: Data primer yang diolah, 2015

Data pada tabel 3 diketahui bahwa nilai *adjusted R*² sebesar 0,872 (87,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman auditor, manajemen risiko, pendidikan, pelatihan, efektivitas pengendalian internal, dan *management support* dapat menjelaskan variabel efektivitas audit internal di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar 87,2%. Sehingga sisanya sebesar 12,8% diterangkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: pengalaman auditor berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak pengalaman yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan efektivitas audit internal. Pendidikan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki auditor maka akan meningkatkan efektivitas audit internal. Pelatihan berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak pelatihan yang diikuti oleh auditor maka akan meningkatkan efektivitas audit internal. Efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi efektivitas pengendalian internal maka akan meningkatkan efektivitas audit internal.

Kemudian untuk manajemen risiko tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut dikarenakan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum optimal dan tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah belum menerapkan manajemen risiko dengan baik dan benar. Sesuai dengan permasalahan yang terdapat pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 yang menyatakan bahwa belum adanya skala prioritas terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obyek pemeriksaan (obrik).

Management support tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas audit internal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak *auditee* (SKPD) yang kurang responsif terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Selain itu tingkatan eselon bagi Inspektur selaku pimpinan tertinggi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih sejajar dengan Kepala SKPD.

Adapun beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: ruang lingkup penelitian hanya pada auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sehingga tidak dapat mewakili auditor Inspektorat yang ada di seluruh Indonesia.

REFERENSI

- Badara, M.S and Saidin, S.Z., 2014. Emperical Evidence of Antecedents of Internal Audit Effectiveness from Nigerian Perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, XIX(1990-9233), p. 460-471.
- Bastian, I., 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Daft, R. L. 2009. *Organization Theory and Design*. 10th edn., United States: South-Western College Publishing.
- Husdo, A.T., dkk., 2014, *Trend Pemberantasan Korupsi 2014*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch.
- Jokipii, A., 2009. Determinants and Consequences of Internal Control in Firms: a Contingency Theory Based Analysis. *Journal Managerial Government*, XIV, p. 115-144.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Marta, M.F., 2015. "Babak Baru Pemberantasan Korupsi". *Kompas*, 28 Mei, hlm. 5.
- Mihret, D.G. and Yismaw, A.W., 2007. Internal Audit Effectiveness: an Ethiopian Public Sector Case Study. *Managerial Auditing Journal*, XXII(0268-6902), p. 470-484.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono, 1992. *Gagasan Pengembangan Profesi & Pendidikan Akuntansi di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.